

## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

**Rizki Kurniasari**

*rizkikurniasari17@gmail.com*

**Kurnia**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya**

### **ABSTRACT**

*This study aims to test in the impact of the source of the local government income which consists of the Local Own-source Revenue and the Fiscal balance toward the human development index through the capital expenditure allocation which is utilized for improving the service and the development of the infrastructure. The type of this study is quantitative which applies secondary data, that is the financial report of the local government which are audited by the financial audit board, and the statistic data form [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). The samples of this study include 38 regencies/cities of East Java in 2017-2019 with the multiple linear regression SPSS version 23. The result of this study shows that the local own-source revenue and the revenue sharing do not directly and indirectly impact to the human development index, the general allocation fund give directly and indirectly impact to the human development index. The special allocation fund does not give impact to the human development index, but it gives indirectly impact to the human development index through the capital expenditure.*

*Keyword : the local own-source revenue, balancing fund, the capital expenditure, the human development index*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sumber pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap indeks pembangunan manusia melalui pengalokasian belanja modal yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan pembangunan infrastruktur. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh BPK dan data statistik dari [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). Kriteria sampel penelitian meliputi seluruh 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2017-2019 dengan analisis regresi linier berganda SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil secara langsung maupun tidak langsung tidak memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, dana alokasi umum secara langsung maupun tidak langsung memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Selanjutnya dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia namun memiliki pengaruh secara tidak langsung melalui belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia.

Kata Kunci : pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, indeks pembangunan manusia

### **PENDAHULUAN**

Akuntansi sektor publik berkembang pesat di Indonesia karena wilayah Indonesia yang luas tidak terlepas dari peran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurut Natasha *et al.*, (2016) kebijakan pemerintah mendukung pertumbuhan laju ekonomi suatu wilayah yang menjadikan salah satu indikator dalam perkembangan ekonomi. Perkembangan akuntansi sektor publik turut mendorong mengarahnya akuntansi keuangan daerah yang merupakan salah satu perhatian besar yang disebabkan adanya kebijakan baru pemerintah Republik Indonesia sejak reformasi di tahun 1998. Perhatian besar diberikan kepada akuntansi sektor privat terutama pada basis akuntansinya sebagai kemandirian Pemerintah Daerah dalam unit-unit organisasi. Standar Akuntansi Pemerintahan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang menggunakan basis kas menuju akrual (*cash toward*

*accrual*), kemudian Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) kembali menerbitkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 berbasis akrual yang harus dilaksanakan oleh entitas pemerintahan selambat-lambatnya tahun anggaran 2014.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan secara sistematis selama satu periode diklasifikasikan menurut pedoman dalam anggaran yang akan dilaksanakan pemerintah. Dalam pelaksanaan pelayanan publik Pemerintah Daerah menyusun rencana keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk provinsi maupun kota atau kabupaten. Pengalokasian dana Pemda didasarkan pada kebutuhan sarana dan prasarana daerah untuk fasilitas publik serta kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pemerintah menerapkan kebijakan Otonomi Daerah dengan kebebasan mengembangkan setiap daerah sesuai dengan potensi yang tersedia, dengan demikian daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah mengatur titik sentral tentang peran Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Pelaksanaan otonomi daerah memunculkan desentralisasi yang bertujuan efisiensi sektor publik. Dengan adanya Otonomi Daerah dapat mempercepat laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, kesenjangan daerah berkurang serta pelayanan publik menjadi meningkat.

Provinsi Jawa Timur telah menerapkan otonomi daerah dengan mengembangkan potensi daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk pembiayaan belanja modal. Fungsi pemerintahan daerah berjalan optimal dengan pendanaan dari penerimaan daerah yang cukup untuk keuangan daerah yang proporsional, demokratis, transparan dan efisien. Berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, PAD sebagai sumber pendapatan setiap daerah berbeda-beda sesuai potensi yang dimiliki setiap daerah itu sendiri. Untuk mengurangi tingkat ketergantungan daerah terhadap dana alokasi umum (DAU) atau dana alokasi khusus (DAK) yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah harus meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Jumlah PAD ditentukan oleh obyek pajak dan retribusi daerah, apabila PAD meningkat maka pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah juga mengalami peningkatan. Peningkatan penerimaan daerah mengalami masalah terkait keterbatasan sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk investasi menimbulkan pertanyaan bagaimana tingkat PAD terhadap alokasi belanja modal apakah sudah tepat. Terdapat sumber lainnya untuk pembangunan daerah dapat menggunakan sumber dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk mengatasi terjadinya ketimpangan pada PAD. Dana perimbangan dialokasikan secara khusus oleh pemerintah pusat kepada daerah sebagai tambahan pendapatan yang memberikan sumbangsih terbesar bagi pendapatan daerah.

Pemerintah Pusat mengalokasikan pembiayaan daerah dalam rangka desentralisasi melalui DAU. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan fiskal, dan potensi daerah. Menurut Harahap (2017) terjadinya transfer antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini sangat berguna bagi masyarakat untuk memperoleh kualitas pelayanan, pendidikan, taraf kehidupan yang sehat dan harapan hidup yang lebih panjang. Dana perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) juga memiliki peran penting dalam pemanfaatan kegiatan program pembangunan daerah dan peningkatan mutu pembangunan manusia serta membangun sarana dan prasarana pelayanan di daerah. Orientasi DAK adalah investasi pembangunan infrastruktur, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana fisik dan penunjangnya. Untuk tercapainya tujuan tersebut maka DAK harus dikelola dengan baik dan optimal. Sumber dana perimbangan selanjutnya adalah

Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dari penerimaan pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagi hasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah.

Belanja modal merupakan bagian yang mendapat dana dari Dana Alokasi Umum dalam APBD yang sudah diperhitungkan perencanaan keuangan jangka panjang terutama pembiayaan dan pemeliharaan aset yang dihasilkan dari belanja modal diantaranya untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin. Dalam mengatur kas milik daerah untuk dipergunakan sebaik mungkin dalam pelayanan publik serta memiliki kemanfaatan (*usefulness*) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (*budget capability*) dalam pengelolaan aset tersebut, misalnya pembangunan infrastruktur yang meningkatkan aktivitas ekonomi berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Dengan melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) dapat diketahui bahwa otonomi daerah berjalan dengan baik. UNDP (*United Nations Development Programme*) pada tahun 1990 mempublikasi laporan tahunan HDR (*Human Development Report*) secara berkala mengenai IPM.

Indeks Pembangunan Manusia adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara atau wilayah di seluruh dunia. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan indeks pembangunan manusia sebagai alat yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Keberhasilan kualitas hidup manusia dapat diukur melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia?, (2) Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia melalui belanja modal?, (3) Apakah dana bagi hasil berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia?, (4) Apakah dana bagi hasil berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia melalui belanja modal?, (5) Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia?, (6) Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia melalui belanja modal?, (7) Apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia?, (8) Apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia melalui belanja modal?. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap indeks pembangunan manusia melalui belanja modal sebagai variabel intervening.

## TINJAUAN TEORITIS

### Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yaitu prinsipal dan agen. Hubungan atau kontrak antara principal dan agent, dimana principal adalah pihak yang mempekerjakan agent agar melakukan tugas untuk kepentingan principal, sedangkan agent adalah pihak yang menjalankan kepentingan principal (Scott, 2015). Jika prinsipal dan agen memiliki tujuan yang sama maka agen akan mendukung dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh prinsipal. Keterkaitan teori keagenan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat (*principal*) dan pemerintah daerah (*agent*). Teori agensi sejalan dengan sistem otonomi yang diselenggarakan di Indonesia, dimana dalam melaksanakan kewenangan tersebut bukan berarti pemerintah daerah melakukan kesewenang-wenangan, meskipun pemerintah pusat dan daerah memiliki kepentingan masing-masing namun keduanya tetap memiliki tujuan yang sama yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Teori agensi juga tersirat dalam hubungan antara pemerintah daerah (*principal*) dan masyarakat (*agent*). Masyarakat sebagai prinsipal menyediakan sumber daya bagi daerah dengan pembayaran pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain untuk meningkatkan pendapatan daerah itu sendiri. Menurut teori keagenan, salah satu cara yang diharapkan dapat menyelaraskan tujuan prinsipal dan agen adalah melalui mekanisme pelaporan (Luayyi, 2010). Informasi merupakan salah satu cara untuk mengurangi ketidakpastian, sehingga memberi akuntan peran yang penting dalam membagi risiko antara manajer dan pemilik. Pramuka *et al.*, (2007) menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu, manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*). Pemerintah harus memastikan pengawasan pada kepatuhan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dilakukan dengan benar agar tercipta tata kelola pemerintahan dan tujuan nasional yang baik. Diharapkan dengan adanya partisipasi antara agen dan prinsipal dapat menciptakan kualitas laporan keuangan yang terpercaya, efektif dan memberikan kontribusi bagi kualitas pembangunan manusia.

### **Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemandirian keuangan daerah dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan atau program pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Pambudi (2018) menjelaskan bahwa kinerja keuangan yang positif dapat dilihat dari tingginya kontribusi pendapatan asli daerah dan kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri. Dalam hal ini, kinerja keuangan yang positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi pada daerah tersebut. Sementara itu, kemandirian keuangan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, dimana semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah dapat menunjukkan kontribusi yang besar masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, dimana kedua hal tersebut merupakan komponen dari pendapatan asli daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan prinsip, asas, dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang diatur didalamnya, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus agar pengelolaan keuangan daerah efektif, efisien, dan transparan.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Melalui PAD pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya. Peran pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan mengharuskan pemerintah daerah memaksimalkannya. Pasal 5 ayat (1) UU 33/2004 memberikan cakupan sumber PAD yang luas mulai dari pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Ketentuan pemungutan pajak dan retribusi daerah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Berdasarkan UU tersebut, terdapat berbagai jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

BUMD berperan dalam peningkatan PAD sangat dibutuhkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan investasi. Selanjutnya yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah penerimaan daerah di luar pajak daerah dan retribusi daerah. Tinggi capaian pendapatan asli daerah pada suatu daerah akan membuktikan bahwa daerah tersebut mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dengan baik. Selain itu, capaian tersebut menunjukkan bahwa daerah tersebut tidak bergantung pada pemerintah pusat. Ketentuan mengenai PAD juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dan ketentuan lainnya yang diatur Menteri Keuangan.

### **Dana Perimbangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 mengenai dana perimbangan ialah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b salah satunya adalah transfer Pemerintah Pusat terdiri atas dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana bagi hasil bersumber dari pajak, cukai dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21. Dana alokasi umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Proporsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan pertimbangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dana alokasi khusus bersumber dari APBN dialokasikan pada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah antara lain dipergunakan untuk pembangunan rumah sakit, pendidikan, jalan, pasar, irigasi dan air bersih. DAK bisa disamakan dengan belanja pembangunan karena digunakan untuk mendanai peningkatan pelayanan publik.

### **Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat/penduduk. Indeks pembangunan manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak dapat digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan dengan perolehan pendapatan masyarakat. Yang artinya ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita mendorong terjadinya paritas daya beli.

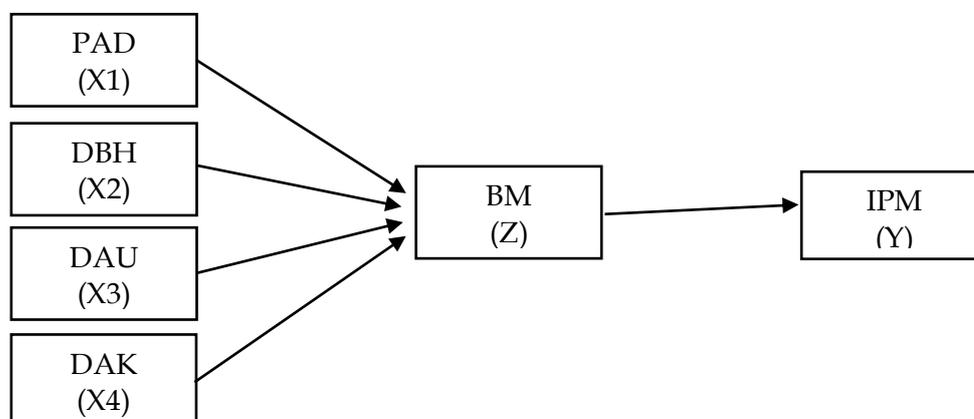
### Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk dibiayakan guna memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memiliki manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010, belanja modal didefinisikan sebagai semua biaya yang dikeluarkan dari rekening kas umum Negara/Daerah mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran dan tidak diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah. Belanja Modal merupakan belanja investasi berupa biaya diakui pada neraca. Belanja modal dianggarkan untuk perolehan pengadaan atau pembangunan aset sampai siap digunakan yang dapat berupa tanah, gedung dan bangunan yang dipakai untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah, belanja modal peralatan dan mesin yang mencakup kendaraan bermotor, alat elektronik maupun inventaris kantor dan peralatan lainnya, serta belanja modal aset tidak berwujud.

Belanja modal diklasifikasikan menjadi dua, yakni belanja publik dan belanja aparatur. Belanja Publik misalnya pembangunan jembatan, irigasi, jaringan, gedung sekolah, gedung kesehatan, mobil ambulan dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Sedangkan Belanja Aparatur adalah belanja yang tidak dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat namun dapat dirasakan oleh aparatur guna menunjang kegiatan kerja dan pelayanan misalnya pembangunan gedung dewan, mobil dinas dan lain-lain. Anggaran belanja modal sangat mendukung keberlangsungan dalam pembangunan infrastruktur fasilitas publik yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, melalui pengalokasian yang tepat dari sumber pendapatan daerah untuk dibelanjakan dalam membangun sarana prasarana maka akan membantu masyarakat dalam perolehan fasilitas dan pelayanan yang baik.

### Rerangka Konseptual

Rerangka konseptual dapat dijelaskan secara garis besar bahwa hubungan empat variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Alokasi Khusus (X3), Dana Bagi Hasil (X4) berpengaruh terhadap variabel dependen yakni Indeks Pembangunan Manusia (Y) dengan Belanja Modal (Z) sebagai variabel intervening. Dalam penelitian ini penulis meneliti apakah sumber dana yang diperoleh daerah meliputi PAD dan Dana Perimbangan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan indeks pembangunan manusia melalui pembiayaan belanja modal.



**Gambar 1**  
Rerangka Konseptual

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal sebagai Variabel Intervening**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang memiliki kekuatan dalam sumber penerimaan daerah untuk membiayai belanja daerah. Sumber pendapatan asli daerah berasal dari pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pemerintah Daerah diharuskan memaksimalkan penerimaan dari sumber pendapatan asli daerah yang mana dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi suatu daerah. Pendapatan asli daerah yang tinggi mencerminkan kegiatan perekonomian di suatu daerah yang berarti produktivitas sumber daya manusia juga cukup baik.

Peningkatan pendapatan yang bersumber dari PAD mendorong kepentingan dan daya beli masyarakat suatu daerah misalnya yang tercermin dari tingginya penerimaan pajak dan pembayaran retribusi artinya terjadi transaksi pemenuhan kebutuhan yang saling berkaitan. Jika terjadi kepadatan kegiatan masyarakat maka pemerintah juga berupaya untuk memberikan fasilitas dalam membiayai belanja modal untuk pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan kegiatan dengan baik. Dengan peningkatan pembangunan dan pelayanan publik maka dengan itu pula akan semakin meningkatkan kegiatan aktivitas masyarakat yang berdampak pada kualitas hidup manusia. Setyowati dan Suparwati (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa, PAD dapat digunakan untuk pembangunan jalan raya yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar. Pembangunan fasilitas kesehatan dapat bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, dimensi umur panjang dan sehat dalam IPM dapat tercapai dengan pembangunan fasilitas kesehatan. Maka dari itu penulis menguji kembali apakah PAD memiliki pengaruh dalam pertumbuhan IPM melalui belanja modal dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia

H<sub>2</sub> : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal

### **Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal sebagai Variabel Intervening**

Dana Bagi Hasil salah satu komponen dari Dana Perimbangan. DBH bersumber dari penerimaan pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPND), dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) serta penerimaan sumber daya alam yang diperoleh dari masing-masing daerah dan pengalokasian dana dibagi beberapa persen sesuai porsi untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. Semakin tinggi penerimaan DBH memperlihatkan semakin luas kegiatan masyarakat dan tingginya pendapatan masyarakat yang mencerminkan peningkatan sumber daya manusia. Sebagai contoh penerimaan cukai mengakibatkan peningkatan terhadap kualitas bahan baku industri, apabila kualitas yang diperoleh tersebut baik maka tercipta lingkungan yang baik pula dan menjalin keharmonisan masyarakat. Dengan penerimaan DBH yang maksimal, maka pengalokasian dana untuk mencukupi kebutuhan daerah juga semakin maksimal. Kebutuhan daerah meliputi belanja-belanja pelayanan dan pembangunan guna membangun sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan desentralisasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dengan adanya DBH diharapkan mampu memberi keseimbangan antara pusat dan daerah dalam peningkatan pembangunan dan pelayanan sehingga berdampak pada kualitas pembangunan manusia. Penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa DBH berpengaruh positif terhadap belanja modal dan IPM, serta belanja modal berpengaruh terhadap IPM.

Variabel belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Setyowati dan Yohana, 2010; Mirza, 2012). Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin menguji kembali pengaruh DBH terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui belanja modal dengan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub> : Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia

H<sub>4</sub> : Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal sebagai Variabel Intervening**

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan transfer dana kepada daerah untuk dialokasikan sebagai belanja modal guna peningkatan pelayanan masyarakat. Alokasi DAU sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang bersumber dari penerimaan perpajakan maupun dari berbagai asumsi hasil sumber daya alam. DAU yang diterima diberbagai daerah berbeda-beda porsinya, oleh karena itu pemerintah daerah harus bisa mengelola alokasi dana tersebut. Apabila penerimaan pajak dalam negeri tinggi hal ini mencerminkan kegiatan ekonomi bergerak aktif, maka hal itu juga akan meningkatkan pengalokasian DAU yang diterima pemerintah daerah. Menurut Setyowati dan Suparwati (2012), DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pelaksanaan desentralisasi dalam penataan daerah dapat mewujudkan efektivitas penyelenggaraan dan tata kelola Pemerintahan Daerah, peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat serta daya saing daerah maupun nasional sehingga hal ini mendorong peningkatan pembangunan manusia.

DAU suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal, dimana kebutuhan fiskal dihitung berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan yang dikalikan bobot variabel yang salah satunya menggunakan Indeks Pembangunan Manusia. Daerah dengan nilai celah fiskal lebih besar dari 0 (nol) menerima DAU sebesar alokasi dasar ditambah celah fiskal. Untuk daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan 0 (nol) menerima DAU sebesar alokasi dasar. Sedangkan daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan nilai celah fiskal. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar tidak menerima DAU. DAU suatu daerah otonom baru dihitung dengan membagi secara proporsional daerah induk yakni menggunakan data jumlah penduduk, luas wilayah, dan belanja pegawai.

Alokasi DAU menjadi penyeimbang dalam pembagian dana daerah yang tersebar diseluruh Indonesia untuk menciptakan pembangunan manusia yang merata dan meningkatkan perkapita. Untuk mendukung pelaksanaan penataan daerah yang optimal, Pemerintah melalui belanja modal menganggarkan pembangunan sarana dan prasarana umum juga menunjang aktivitas kegiatan masyarakat berdasarkan pertimbangan strategis nasional yang dibutuhkan setiap daerah. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali pengaruh DAU terhadap IPM melalui belanja modal yang dirumuskan dalam hipotesis:

H<sub>5</sub> : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia

H<sub>6</sub> : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal

## **Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal sebagai Variabel Intervening**

Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk daerah tertentu guna membiayai kegiatan khusus oleh pemerintah kabupaten/kota untuk menunjang pembangunan prioritas nasional dengan tujuan meminimalkan kesenjangan antara daerah. Dengan adanya alokasi DAK diharapkan mampu dimanfaatkan penggunaannya sebaik mungkin guna mencukupi kebutuhan belanja pembangunan dan meningkatkan pembangunan manusia di suatu daerah. Menurut Setyowati dan Suparwati (2012), DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah-daerah tertentu dalam rangka mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan termasuk dalam program prioritas nasional.

DAK terbagi atas 2 jenis, DAK fisik dan non fisik. Pengalokasian DAK fisik kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik urusan daerah yang terdiri atas DAK reguler, afirmasi, dan penugasan. Sedangkan DAK non fisik digunakan untuk mendanai kegiatan khusus non fisik yang terdiri atas Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Tunjangan Khusus Guru PNSD di daerah khusus, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM), dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk). Tahun 2019 terdapat 4 tambahan jenis DAK non fisik berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Tambahan jenis DAK non fisik tersebut adalah Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan, BOP Museum dan Taman Budaya, Dana Pelayanan Kepariwisata serta Bantuan Biaya Layanan Pengelolaan Sampah (BPLS).

Pengalokasian DAK dapat membantu peningkatan pendapatan yang berdampak pada pendidikan dan kehidupan yang layak, sehingga IPM meningkat. Guna menunjang keberhasilan tersebut dibutuhkan sarana yang dapat memfasilitasi berbagai kegiatan dan pelayanan kesehatan, pendidikan dan lain-lain melalui belanja modal. Dapat disimpulkan bahwa alokasi DAK memiliki peran dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui pembiayaan pendanaan bantuan maupun belanja modal untuk menunjang kegiatan diberbagai bidang. Oleh karena itu penulis mencoba meneliti kembali seberapa berpengaruh DAK terhadap IPM melalui belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan perumusan hipotesis:

H<sub>7</sub> : Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia

H<sub>8</sub> : Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi**

Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan ekplanasi komparatif dan angka statistik dengan pengujian teori yang menggambarkan karakteristik subjek untuk mengetahui pengaruh variabel independen dengan variabel dependen dan/atau melalui variabel intervening yang saling berhubungan dan dapat dibandingkan. Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari tahu jawaban secara mendasar mengenai sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Adapun variabel bebas yaitu PAD, DAU, DAK, DBH. Sedangkan variabel terikat yakni IPM dan belanja modal sebagai variabel penghubung.

Populasi dalam penelitian ini menggunakan total sampling yakni Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada LKPD seluruh 38 kabupaten/kota di Jawa Timur terdiri dari 9 Kota dan 29 Kabupaten untuk periode laporan keuangan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang telah diaudit oleh BPK serta data statistik IPM di Jawa Timur yang diperoleh

melalui website [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) milik Badan Pusat Statistik. Penelitian ini menggunakan total sampling atau semua sampel untuk mendapatkan PAD, DAK, DAU, DBH dan Belanja Modal pada laporan realisasi anggaran yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur selama tiga periode mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2019.

Jenis data pada penelitian menggunakan data sekunder. Sumber data berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang terdapat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diperoleh secara tidak langsung yakni dengan permintaan via email ke BPK Pusat. Data kedua yaitu pengamatan untuk memperoleh gambaran pada data statistik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur yang diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)). Data yang diambil berdasarkan tiga tahun mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

### **Definisi Operasional Variabel**

#### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah guna menciptakan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

$PAD = \sum \text{Pendapatan Asli Daerah}$

$PAD = \sum \text{Pendapatan pajak daerah} + \text{Pendapatan retribusi daerah} + \text{pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang sah}$

#### **Dana Alokasi Umum**

DAU berasal dari dana APBN yang dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota dengan perbandingan proporsi bobot yang diatur oleh pemerintah pusat. Alokasi DAU juga diukur dengan melihat IPM sebagai alokator penentu.

$DAU = \sum \text{Dana Alokasi Umum}$

#### **Dana Alokasi Khusus**

DAK berasal dari dana APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah dengan besaran yang berbeda-beda setiap daerah yang digunakan untuk pengalokasian biaya kebutuhan khusus.

$DAK = \sum \text{Dana Alokasi Khusus}$

#### **Dana Bagi Hasil**

Penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip *Based on Actual Revenue* yakni penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan (Pasal 23 UU 33/2004) DBH PBB dan PPh dibagi kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi. DBH CHT dan DBH SDA dibagi dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

$DBH = \sum \text{Dana Bagi Hasil}$

#### **Indeks Pembangunan Manusia**

IPM atau *Human Development Index* (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. Suatu negara dapat dikatakan negara maju atau berkembang salah satunya dengan melihat klasifikasi IPM dari kebijaksanaan perekonomian negara dan kualitas hidup masyarakat.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{UHH} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}} \times 100$$

### Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran untuk pembayaran perolehan atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/ aset lainnya yang ditetapkan Pemerintah. Aset tetap/aset lainnya dipergunakan untuk operasional kegiatan Satker atau publik, tercatat sebagai aset Kementerian/Lembaga terkait dan bukan untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah.

$$BM = \sum \text{Belanja Modal}$$

### Teknik Analisis Data

Analisis data berupa statistik deskriptif yang memberikan gambaran data agar dapat lebih mudah untuk dipahami dalam pengelompokan data variabel-variabel.

### Model Regresi Linier Berganda

Model regresi linier berganda merupakan uji analisis regresi menggunakan variabel bebas yang berjumlah lebih dari satu variabel terikat.

$$\begin{aligned} BM &= \alpha + \beta_1 \text{ PAD} + \beta_2 \text{ DBH} + \beta_3 \text{ DAU} + \beta_4 \text{ DAK} + e \\ IPM &= \alpha + \beta_1 \text{ PAD} + \beta_2 \text{ DBH} + \beta_3 \text{ DAU} + \beta_4 \text{ DAK} + \beta_5 \text{ BM} + e \end{aligned}$$

Keterangan:

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

BM : Belanja Modal

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DAU : Dana Alokasi Umum

DAK : Dana Alokasi Khusus

DBH : Dana Bagi Hasil

$\alpha$  : Konstanta

$\beta$  : Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan).

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji model regresi distribusi normal pada variabel dependen dan independen. Menurut Ghozali (2016) dasar pengambilan keputusannya jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, atau garis histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

#### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas untuk menguji model regresi adanya kolerasi antar variabel-variabel satu dengan lainnya, yang mana model regresi dikatakan baik tidak terjadi diantara variabel bebas. Multikolinearitas terjadi apabila nilai tolerance kurang dari 0,1. *Variation Inflation Factor* (VIF) bernilai sekitar 10 dan mempunyai angka toleransi mendekati 1 (Santoso, 2009:26).

#### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan uji model regresi adanya kesamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika tidak terjadi heterokedastisitas, maka model regresi dinilai baik. Deteksi adanya heterokedastisitas yaitu deteksi dengan melihat ada

atau tidaknya pola tertentu pada grafik dimana sumbu Y telah diprediksi dan sumbu X adalah residual ( $Y_{\text{prediksi}} - Y_{\text{sesungguhnya}}$ ) telah di standardized.

### **Koefisien Determinasi (*R square*)**

Koefisien determinasi yang biasa disebut *R square* atau R kuadrat, dimana variabel bebas sebagai penyumbang dalam mempengaruhi variabel terikat. Dalam analisis regresi liner berganda dibuktikan apakah variabel-variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat yang akan di uji.

### **Uji Kelayakan (Uji F)**

Uji F atau Goodness of Fit dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Uji kelayakan model pada dasarnya berfungsi untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh terhadap variabel terikatnya (Kuncoro, 2009:69).

### **Uji Hipotesis (Uji T)**

Uji T atau uji parsial dilakukan untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji T dapat dilakukan dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing t hitung, pengujian menggunakan significance level 0,05 ( $\alpha=5\%$ ).

## **HASIL PENELITIAN**

### **Gambaran Umum Objek Penelitian**

Jawa Timur adalah salah satu provinsi di Indonesia, terdapat 38 Kabupaten/Kota yang terletak di Pulau Jawa bagian timur. Provinsi Jawa Timur memiliki wilayah terluas diantara 6 provinsi di Pulau Jawa dengan luas wilayah 47.922 km<sup>2</sup> yang didiami oleh berbagai macam etnis suku dengan 39.698.631 jiwa penduduk (per 2019) yakni merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk terbesar kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di timur. Samudera Hindia di selatan, serta Provinsi Jawa Tengah di barat. Panjang bentangan barat-timur sekitar 400 km, lebar bentangan utara-selatan di bagian barat sekitar 200 km, namun di bagian timur lebih sempit hingga sekitar 60 km. Madura adalah pulau terbesar di Jawa Timur, dipisahkan dengan daratan Jawa oleh Selat Madura. Pulau Bawean berada sekitar 150 km sebelah utara Jawa. Di sebelah timur Madura terdapat gugusan pulau-pulau, yang paling timur adalah Kepulauan Kangean, dan yang paling utara adalah Kepulauan Masalembu. Di bagian selatan terdapat dua pulau kecil yakni Nusa Barung, dan Pulau Sempu.

Jawa Timur dikenal sebagai pusat industri dan keuangan kawasan Tengah dan Timur Indonesia dengan kontribusi signifikansi perekonomian cukup tinggi sekitar 15% terhadap Produk Domestik Bruto nasional. Banyak berbagai objek wisata alam yang ditawarkan mulai dari gunung, pantai, gua, air terjun. Surabaya menjadi Ibu kota di Jawa Timur yang merupakan kota terbesar kedua di Indonesia.

**ANALISIS**

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Statistic Deskriptive**

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
PAD	114	.61	1.63	1.1034	.20756
DBH	114	.58	3.26	1.1686	.48621
DAU	114	.97	1.09	1.0078	.02693
DAK	114	.53	2.28	1.0453	.23964
BM	114	.40	2.17	1.0167	.28269
IPM	114	.12	1.10	.6317	.22778
Valid N (listwese)					

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Berdasarkan statistic deskriptive pada Tabel 1 menunjukkan bahwa penelitian ini terdiri dari 38 Kabupaten/Kota selama 3 tahun dengan total 114 data yang diobservasi. Semua nilai standar deviasi menunjukkan angka lebih kecil dari mean yang berarti bahwa data berdistribusi normal.

PAD dengan nilai minimum 0,61 yang diperoleh Kabupaten Sampang Rp135.349.867.961,19 dengan nilai rata-rata 1,1034 atau Rp513.243.550.219,-. Sedangkan capaian PAD maksimum diperoleh Kota Surabaya pada tahun 2019 sebesar Rp5,38 triliun. Kota Batu menerima DBH paling sedikit pada 2017 yakni 0,58 atau sebesar Rp43.445.796.142,- dengan rata-rata 1,1686 atau Rp162.410.612.209,-. Sedangkan DBH maksimum diperoleh Kabupaten Bojonegoro dengan nilai 3,26 atau lebih dari 2,5 milyar rupiah. Pemerintah Kota Mojokerto pada 2017 memperoleh DAU paling rendah di Jawa Timur sebesar Rp390.118.825.000,- dengan nilai minimum 0,97, sementara mean 1,0078 atau Rp961.371.975.803,-. DAU tertinggi tiga tahun berturut periode 2017-2019 diperoleh Kabupaten Jember dengan nilai maksimum 1,09 pada 2019 sebesar Rp1.765.927.493.000,-. Kota Mojokerto pada tahun 2019 menerima DAK paling rendah di Jawa Timur dengan nilai minimum 0,53 atau Rp61.400.515.537,- dan nilai rata-rata 1,0453 sebesar Rp292.061.217.317,-. Sedangkan nilai maksimum DAK 2,28 diperoleh Kabupaten Malang pada tahun 2019 sebesar Rp595.626.071.360,-.

Belanja modal memiliki nilai minimum 0,40 atau sebesar Rp121.144.916.729,- pada tahun 2018 diperoleh Kota Mojokerto, sedangkan belanja modal maksimum 2,17 atau lebih dari 2,754 triliun rupiah yang diperoleh Kota Surabaya tahun 2019. IPM memiliki nilai minimum 0,12 yang ditempati Kabupaten Sampang pada 2017 atau mencapai indeks 59,9 termasuk ke dalam kategori “rendah”, sedangkan capaian IPM tertinggi 82,22 ditunjukkan dengan nilai maksimum 1,10 diperoleh Kota Surabaya tahun 2019. Sementara nilai standar deviasi 0,22778 lebih kecil dari nilai rata-rata 0,6317 yang menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

**Uji Regresi Linier Berganda**

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda Tahap 1**

Model		Coefficients <sup>a</sup>		Standardized Coefficients	T	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Std. Error			
1	(Constant)	-3.383	1.087		-3.111	.002
	PAD	.026	.148	.019	.176	.860
	DBH	-.136	.065	-.234	-2.104	.038
	DAU	4.150	.968	.395	4.287	.000
	DAK	.332	.105	.282	3.163	.002

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Model persamaan pada Tabel 2 di atas adalah:

$$BM = -3,383 + 0,026PAD - 0,136DBH + 4,150DAU + 0,332DAK$$

Nilai Konstanta atau intercept adalah -3,383. Nilai koefisien regresi pendapatan asli daerah adalah 0,026 bernilai positif yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel PAD dengan belanja modal. Nilai koefisien regresi dana bagi hasil adalah 0,136, nilai koefisien regresi ini bersifat negatif dengan belanja modal. Nilai koefisien regresi dana alokasi umum sebesar 4,15, bersifat positif yang memiliki hubungan searah antara DAU dengan belanja modal. Nilai koefisien regresi dana alokasi khusus adalah positif 0,332 yang menunjukkan hubungan searah antara variabel DAK dengan tingkat belanja modal.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda Tahap 2**

Model		Coefficients <sup>a</sup>		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1	(Constant)	-1.793	1.002		-1.789	.076
	PAD	-.051	.131	-.047	-.392	.696
	DBH	-.026	.058	-.055	-.442	.659
	DAU	2.413	.924	.285	2.611	.010
	DAK	.042	.097	.042	.438	.662
	BM	.034	.085	.042	.403	.688

a. Dependent Variable: IPM

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Model persamaan pada Tabel 3 di atas adalah:

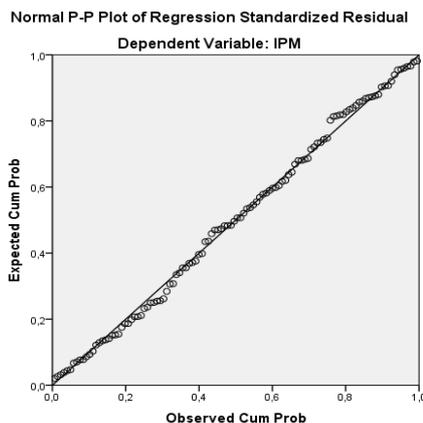
$$IPM = -1,793 + 0,051PAD - 0,026DBH + 2,413DAU + 0,042DAK + 0,034BM$$

Nilai Konstanta atau intercept adalah -1,793. Nilai koefisien regresi PAD adalah negatif 0,051 menunjukkan hubungan yang tidak searah antara variabel pendapatan asli daerah dengan IPM. Nilai koefisien regresi dana bagi hasil adalah negatif 0,026 berlawanan arah dengan IPM. Nilai koefisien regresi dana alokasi umum sebesar 2,413, bersifat positif yang memiliki hubungan searah antara DAU dengan IPM. Nilai koefisien regresi dana alokasi khusus adalah 0,042 yang bernilai positif menunjukkan hubungan searah antara variabel DAK dengan IPM. Nilai koefisien regresi belanja modal adalah positif 0,034 menunjukkan hubungan searah antara variabel belanja modal dengan IPM.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji distribusi normal dari variabel-variabel dalam model regresi dengan menggunakan pendekatan grafik dan model Kolmogorov Smirnov.



**Gambar 2**  
**Grafik Normal P-Plot**  
 Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Dari gambar di atas didapat sebaran data berupa titik-titik yang berada pada sumbu diagonal dan mengikuti arah garis histogram, maka pendekatan grafik pada model regresi ini memenuhi asumsi normalitas karena data berdistribusi normal.

**Tabel 4**  
**Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized Residual		
N		114
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.21555403
Most Extreme Differences	Absolute	.056
	Positive	.050
	Negative	-.0156
Test Statistic		.056
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4 di atas didapatkan nilai *Asymp sig (2-tailed)* sebesar 0,200, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal karena telah memenuhi ketentuan  $0,200 > 0,05$ .

**Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji model regresi yang baik dan tidak mengandung multikolinearitas yang dapat dilihat dari nilai *Tolerance (TOL)* dan *Variance Inflation Factor (VIF)* dari variabel bebas dengan variabel terikat.

**Tabel 5**  
**Uji Multikolinearitas**

Variabel	Tolerance	Collinearity Statistic	
		VIF	Keterangan
Pendapatan Asli Daerah	.583	1.716	Bebas Multikolinearitas
Dana Bagi Hasil	.534	1.873	Bebas Multikolinearitas
Dana Alokasi Umum	.694	1.441	Bebas Multikolinearitas
Dana Alokasi Khusus	.796	1.256	Bebas Multikolinearitas
Belanja Modal	.752	1.330	Bebas Multikolinearitas

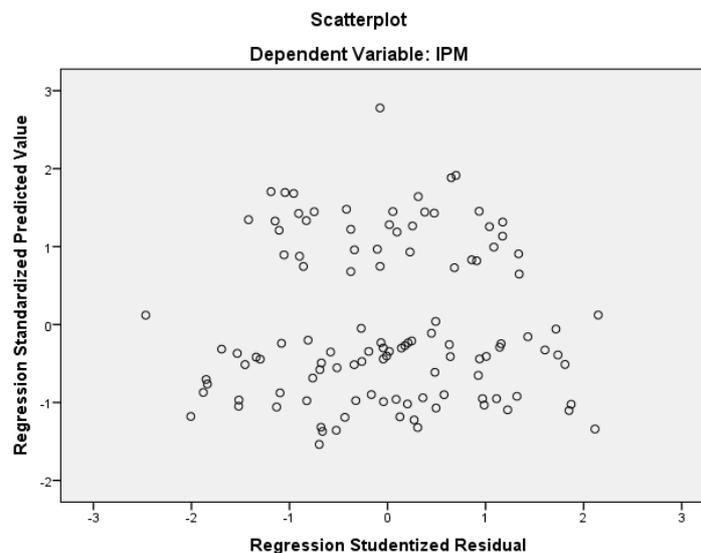
a. Dependent Variable: IPM

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Semua nilai variabel independen memiliki nilai TOL mendekati satu atau lebih besar dari 0,1 dan juga menunjukkan semua variabel independen mempunyai nilai VIF kurang dari 10. Dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari multikolinearitas antar variabel.

### Uji Heteroskedastisitas

Dengan menggunakan grafik scatterplot dapat diketahui gejala heteroskedastisitas antara Zpred dan Sresid.



**Gambar 3**  
**Grafik Scatterplot**  
Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Gambar 3 terlihat penyebaran titik-titik secara acak dan tidak membentuk suatu pola yang jelas, titik-titik menyebar atas dan bawah angka 0 sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dan dapat dilakukan analisa lebih lanjut.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Nilai koefisien determinasi terletak antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen mampu memberikan informasi variabel dependen lebih luas.

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi Model 1**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.498	.248	.221	.24957

a.Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU, DBH

b.Dependent Variable: BM

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Pada Tabel 6 diketahui nilai koefisien determinasi model pertama menunjukkan nilai *R square* sebesar 0,248 atau 24,8 persen, artinya bahwa variabel pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dapat menjelaskan variasi belanja modal hanya sedikit, sisanya dijelaskan oleh faktor lain diluar model pada penelitian ini.

Sedangkan pada hasil uji koefisien determinasi model kedua disajikan sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi Model 2**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	.323	.104	.063	.22049

a.Predictors: (Constant), BM, PAD, DAK, DAU, DBH

b.Dependent Variable: IPM

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Diketahui nilai koefisien determinasi model kedua diperoleh nilai *R square* sebesar 0,104 atau 10,4 persen, hanya sedikit variasi pengungkapan tingkat kesejahteraan masyarakat yang terlihat dari indeks pembangunan manusia dapat dijelaskan dari pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan juga melalui belanja modal, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk pada penelitian ini.

### Uji Kelayakan (Uji F)

Uji F digunakan untuk melihat seberapa jauh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan level signifikan 0,05 ( $\alpha=5\%$ ).

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Kelayakan (Uji F) Model 1**

ANOVA						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Squares	F	Sig.
1	Regression	2.242	4	.560	8.998	.000 <sup>b</sup>
	Residual	6.789	109	0.62		
	Total	9.031	113			

a. Dependen variable: BM

b. Predictors (Constan), DAK, PAD, DAU, DBH

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Nilai F 8,998 dengan signifikansi 0,0 yang artinya kurang dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap tingkat belanja modal. Oleh karena itu, hasil regresi dalam penelitian ini layak dijadikan sebagai penelitian.

Sedangkan uji kelayakan model kedua dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 9**  
**Hasil Uji Kelayakan (Uji F) Model 2**

ANOVA						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Squares	F	Sig.
1	Regression	.613	5	.123	2.520	.034 <sup>b</sup>
	Residual	5.250	108	0.49		
	Total	5.863	113			

a. Dependen variable: IPM

b. Predictors (Constan), BM, PAD, DAK, DAU, DBH

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Nilai F 2,520 dengan signifikansi sebesar  $0,034 < 0,05$ , hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Sehingga hasil regresi dalam penelitian ini layak dijadikan sebagai penelitian.

### Uji Hipotesis (Uji t)

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 10, pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel dependen dapat diperoleh sebagai berikut:

**Tabel 10**  
**Hasil Uji t Regresi Model 2**

Variabel	Coefficients <sup>a</sup>		Keterangan
	t	Sig.	
Pendapatan Asli Daerah	-.392	.696	Hipotesis Ditolak
Dana Bagi Hasil	-.442	.659	Hipotesis Ditolak
Dana Alokasi Umum	2.611	.010	Hipotesis Diterima
Dana Alokasi Khusus	.438	.662	Hipotesis Ditolak
Belanja Modal	.403	.688	

a. Dependent Variable: IPM

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 11, pengaruh tidak langsung variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel intervening dapat diperoleh sebagai berikut:

**Tabel 11**  
**Hasil Uji t Regresi Model 1**

Variabel	Coefficients <sup>a</sup>		Keterangan
	t	Sig.	
Pendapatan Asli Daerah	.176	.860	Hipotesis Ditolak
Dana Bagi Hasil	-2.104	.038	Hipotesis Ditolak
Dana Alokasi Umum	4.287	.000	Hipotesis Diterima
Dana Alokasi Khusus	3.163	.002	Hipotesis Diterima

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia menghasilkan t hitung negatif 0,392 dengan nilai signifikansi 0,696 lebih besar dari 0,05 artinya tidak signifikan. Pendapatan asli daerah terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, sehingga hipotesis pertama ditolak.

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Belanja Modal menghasilkan nilai signifikansi 0,860 lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak signifikan. Pendapatan asli daerah terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia melalui belanja modal, sehingga hipotesis kedua ditolak.

Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia menghasilkan nilai t negatif 0,442 dengan tingkat signifikansi 0,659 lebih besar dari probabilitas 0,05 artinya tidak signifikan. Dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, sehingga hipotesis ketiga ditolak.

Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal menghasilkan nilai signifikansi 0,038 lebih kecil dari probabilitas 0,05 namun t hitung menunjukkan arah negatif yang artinya tidak signifikan berpengaruh positif. Sehingga dana bagi hasil tidak berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia melalui belanja modal, maka hipotesis keempat ditolak.

Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia menghasilkan nilai t hitung 2,611 dengan signifikansi 0,010 lebih kecil dari probabilitas 0,05 yang artinya signifikan. Dana alokasi umum terbukti berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia, sehingga hipotesis kelima diterima.

Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal menghasilkan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, yang artinya

signifikan. Dana alokasi umum terbukti berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia melalui belanja modal, sehingga hipotesis keenam diterima.

Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia menghasilkan nilai  $t$  hitung 0,438 dengan signifikansi 0,662 > 0,05, artinya tidak signifikan. Dana alokasi khusus terbukti tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, sehingga hipotesis keempat ditolak.

Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal menghasilkan nilai signifikansi 0,002 < dari probabilitas 0,05 yang berarti signifikan. Dana alokasi khusus terbukti berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia melalui belanja modal, sehingga hipotesis kedelapan diterima.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur tahun 2017 hingga 2019. Peningkatan PAD dalam bentuk penyesuaian tarif pajak, retribusi dan pendapatan lainnya masih belum mengoptimalkan fungsi aset dan pelayanan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Fadhly (2017) bahwa PAD memiliki hubungan negatif dengan IPM daerah, hal ini dapat dikarenakan pemeriksaan penerimaan pendapatan asli daerah kurang cermat sehingga belum tepat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah. Disebutkan juga bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap peningkatan IPM karena mengindikasikan belum optimalnya pengelolaan pendapatan asli daerah (Riviando *et al.*, 2019). Demikian juga Wiliantara dan Budiasih (2016) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah kurang bijak dalam mengalokasikan rasio pendapatan asli daerah untuk kepentingan publik.

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal**

Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur tahun 2017 sampai dengan 2019. Proporsi pendapatan asli daerah yang dialokasikan melalui belanja modal belum cukup mendanai pembangunan infrastruktur fasilitas umum dibidang pendidikan dan kesehatan serta sektor lain yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dan pelayanan masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia untuk mencapai peningkatan IPM.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Melgiana *et al.*, (2020) menyatakan bahwa hubungan pendapatan asli daerah dengan indeks pembangunan manusia melalui belanja modal tidak teruji signifikan. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Riviando *et al.*, (2019) bahwa belanja modal tidak mampu memediasi pendapatan asli daerah untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Hal ini dapat dikarenakan belanja modal yang dianggarkan oleh pemerintah belum memaksimalkan sumber penerimaan PAD yang mendukung kualitas kesejahteraan masyarakat dengan dimensi dasar IPM. Pendapatan asli daerah yang diterima cenderung dialokasikan untuk timbal balik bagi penyeter retribusi dan wajib pajak sehingga tidak merata untuk memenuhi kebutuhan pada bidang yang lain seperti pendidikan dan kesehatan.

### **Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur tahun 2017 hingga 2019. Semakin banyak DBH belum tentu dapat memberikan peningkatan IPM. Peningkatan dana bagi hasil belum mampu menaikkan indeks

pembangunan manusia dikarenakan perlu mempersiapkan kepentingan tersebut membutuhkan jangka panjang untuk transformasi pembangunan daerah.

Penelitian ini mendukung penelitian Harahap (2017) dimana Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara hal ini dapat dikarenakan kurang maksimal dalam menggali potensi daerah penghasil. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Wiliantara dan Budiasih (2016) juga mengatakan bahwa dana bagi hasil kurang berdampak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Wewenang DBH bukan hanya pemerintah daerah melainkan juga wewenang pemerintah pusat.

### **Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal**

Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur tahun 2017 sampai dengan 2019. Dana bagi hasil yang diperoleh daerah bersifat fluktuatif dari pendapatan APBN sesuai potensi daerah itu sendiri sehingga tidak hanya untuk biaya belanja modal namun juga untuk pembangunan berkesinambungan, peningkatan sumber daya alam dan sebagai dana cadangan apabila pendapatan lainnya mengalami kemerosotan.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Wiliantara dan Budiasih (2016) bahwa kemampuan dana bagi hasil dalam membiayai belanja modal tidak mempengaruhi capaian indeks pembangunan manusia. Hal ini dapat dikarenakan prosentase pengalokasian dana bagi hasil daerah kurang berkontribusi dalam menunjang belanja modal yang digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana umum maupun menanggulangi ketimpangan fiskal yang berdampak pada belum meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur tahun 2017 sampai dengan 2019. Pemerintah melalui kebijakan proporsi DAU yang dialokasikan untuk kepentingan umum membantu memenuhi kebutuhan pendanaan, fungsi layanan dasar dan gaji pegawai mampu memberikan motivasi agar tercipta pelayanan yang baik. Pengalokasian dana alokasi umum yang berasal dari APBN efektif dalam penyelenggaraan dan tata kelola mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat untuk mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia.

Penelitian ini didukung oleh peneliti sebelumnya Riviando *et al.*, (2019) menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Sesuai dengan tujuannya dalam pelaksanaan desentralisasi dan pemerataan keuangan daerah, transfer DAU tanpa syarat dan dengan syarat dapat mewujudkan efektivitas peningkatan pelayanan daerah yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga angka IPM daerah juga mengalami peningkatan.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal**

Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur tahun 2017 hingga 2019. DAU yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan fiskal melalui proporsi anggaran belanja modal dapat melaksanakan penataan daerah berupa pemenuhan kebutuhan optimal dan pembangunan sarana prasarana yang memadai sehingga mewujudkan peningkatan IPM.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Setyowati dan Suparwati (2012), DAU yang berasal dari APBN dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antardaerah untuk membiayai program dan kegiatan akan kebutuhan belanja dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang diharapkan dapat berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Pengalokasian DAU untuk kebutuhan belanja modal dalam pembangunan infrastruktur diberbagai bidang kesehatan, pendidikan dapat meningkatkan kualitas pelayanan umum baik secara ketersediaan dan keamanan sehingga masyarakat dapat terjamin kehidupannya sehingga bentuk dimensi dalam IPM meningkat.

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 sampai dengan 2019. DAK belum mampu menunjang pembangunan prioritas untuk meminimalkan kesenjangan daerah hal ini dapat dikarenakan jumlah DAK lebih kecil dibandingkan dengan DAU, sedangkan kebutuhan dan program kegiatan di daerah yang masih minim membutuhkan biaya pelayanan besar untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan.

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, dana alokasi khusus dalam meningkatkan IPM tidak hanya dari segi kuantitas berupa fisik banyaknya sarana dan prasarana melainkan juga harus dari kualitas taraf hidup manusia bagaimana penatausahaan, lingkungan hidup, pelayanan dasar yang diterima dan pemerataan ekonominya (Adiputra *et al.*, 2015; Sakoro dan Zulfikar, 2016).

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal**

Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur tahun 2017 sampai dengan 2019. Sesuai dengan namanya dana alokasi khusus ditujukan untuk membiayai operasional khusus berupa bantuan dan tunjangan pengalokasian DAK fisik dan non fisik. Jika jumlah DAK meningkat maka hal ini akan memberikan kontribusi yang besar juga untuk alokasi belanja modal yang ditujukan membiayai kebutuhan operasional pada bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan kependudukan maupun operasi UKM.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Rivianto *et al.* (2019) bahwa pendapatan transfer pusat berupa dana alokasi khusus menunjang kualitas pembangunan dengan diprosikan oleh biaya belanja modal yang dikhususkan untuk program yang menjadi prioritas daerah, misalnya pada bidang pendidikan dan kesehatan maupun ekonomi dengan adanya perbaikan dan pembangunan fasilitas layanan meningkatkan ilmu pengetahuan, tingkat kesehatan dan standar hidup layak dengan demikian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil secara langsung maupun tidak langsung tidak memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, dana alokasi umum secara langsung maupun tidak langsung memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Selanjutnya dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia namun memiliki pengaruh secara tidak langsung melalui belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia.

### **Saran**

Penelitian ini telah dilakukan sesuai dengan kaidah dan prosedur ilmiah, namun variasi variabel independen dan rentang waktu periode yang diteliti kurang dalam menjelaskan pengaruhnya pada belanja modal dan indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur, yakni berada pada nilai determinasi dibawah 0,3 atau hanya dibawah 30% sehingga

diperlukan penelitian menggunakan model variabel lain diluar variabel dalam penelitian ini. Maka untuk pengembangan penelitian selanjutnya agar menambah variabel lain seperti SiLPA yang efektif dalam anggaran APBD dan alokasi belanja modal atau Bantuan Keuangan Provinsi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Salemba Empat. Jakarta.
- Adiputra, M., N. K. Yantari dan D. K. Darmada. 2015. Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan SiLPA terhadap kualitas Pembangunan Manusia dengan Alokasi Belanja Modal sebagai variabel intervening. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII*.
- Badan Pusat Statistik. 2015. Indeks Pembangunan Manusia. <http://www.bps.go.id>. 30 Oktober 2020 (20:05).
- Fadhly, Z. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang* 1(1): 1-15
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMB SPSS 23, edisi 8*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Harahap, R. U. 2017. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara. *Kitabah: Jurnal Keuangan dan Akuntansi Syariah* 2(1): 129-142.
- Kuncoro, M. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Erlangga. Jakarta.
- Luayyi, S. 2010. Teori Keagenan dan Menejemen Laba. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 2(1): 53-56.
- Lugastoro, D. P. 2013. Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* 11(3): 1-19.
- Melgiana, A. C., I. W. Rupa dan N. P. Riasning. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening di Kota/Kabupaten Provinsi Bali. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa* 1(1): 45-49.
- Mirza, D. S. 2012. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal* 1(2): 1-15.
- Mononimbar, R. W., E. N. Walewangko dan J. Samual. 2017. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Daerah sebagai variabel intervening di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 17(2): 48-59.
- Natasha, H. H., Gunther dan G., Schulze. 2016. *Taxing Times in Indonesia: The Challenge of Restoring Competitiveness the Search for Fiscal Space*. Bulletin of Indonesian Economic Studies 52(3): 265-295.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 *Pengelolaan Keuangan Daerah*. 6 Maret 2019. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. Nomor 71 Tahun 2010 *Standar Akuntansi Pemerintah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Jakarta.
- Pambudi, S. B. 2018. Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Barat. *Makalah Bogor*. Intitut Pertanian Bogor.
- Prakosa, B. K. 2004. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY). *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 8(2): 101-118.

- Pramuka, A. Bambang dan Ujjiyanto. 2007. Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi X Makassar*. IAI. 2007.
- Priambudi, W. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013. *Jurnal Nominal* 4(1): 138-142.
- Putra, P. G. M, dan Ulupui, I. G. 2015. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Khusus untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 11(3): 863-877.
- Raviyanti, A. A., S. Rahayu dan D. P. Mahardika. 2017. Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap IPM Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2009 -2013). *Jurnal Manajemen* 22(2): 243-256.
- Riviando, A., H. Agustin, dan Halmawati. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1(1): 1-17.
- Sakoro, H. dan Zulfikar. 2016. Pengaruh Dana Alokasi Khusus dan PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 1(1): 54-61.
- Santoso, S. 2009. *Statistik Multivaria*. PT. Elek Media Komputindo Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Scott, W. R. 2015. *Financial Accounting Theory*. 7th Edition. Printice Hall. United States of America
- Setyowati, L. dan Suparwati, Y. K. 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai variabel intervening. *Prestasi* . Juni 2012: 9(1).
- Sugiyono. 2007. *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung
- \_\_\_\_\_. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung
- Sumiyati, E. 2011. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Propinsi Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.
- Wiliantara, G. F. dan I. G. N. Budiasih. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 16(3): 2044-2070.